

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO

Fanny Torar, Paulus Kindangen, Vecky Masinambow

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menuntut pembangunan yang merata di setiap daerah sehingga pembangunan yang tadinya dilaksanakan secara terpusat diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan pemerintah dibidang otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menata ulang hubungan antara pusat dan daerah dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang menyangkut urusan penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota memaikan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan kebersihan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apakah pengawasan berpengaruh terhadap APBD dan pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pengawasan Reguler berpengaruh negatif tidak signifikan secara statistik terhadap APBD. Anggaran Pengawasan Khusus berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap APBD Kota Manado. Anggaran Pengawasan Reguler berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Anggaran Pengawasan Khusus berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel APBD berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.

Kata kunci: *Anggaran Pengawasan, APBD, Pertumbuhan Ekonomi*

ABSTRACT

The change in the government system from centralization to decentralization requires demand for equitable development in each region so that the development that was carried out centrally was given to the regions to regulate their own regions. Government policy in the area of regional autonomy is basically intended to rearrange relations between the center and the regions in various tasks and responsibilities concerning the affairs of administering the government. The Inspectorate is a supervisory institution within the local government, both at the provincial, district or city levels displaying a very important and significant role for the progress and cleanliness of regional government and regional apparatus in the local government in carrying out governance in the regions and achieving the goals and objectives set. With the increasing demands of the community for the administration of a clean, fair, transparent and accountable government, it must be taken seriously and systematically. The purpose of this study is to analyze whether supervision influences the regional budget and economic growth in the city of Manado. The analysis technique used is path analysis. The results showed that the Regular Oversight Budget had a negative effect not statistically significant on the APBD. The Special Supervision Budget has a positive and not statistically significant effect on the Manado City Budget. The Regular Oversight Budget has no significant negative effect on Economic Growth. The Special Supervision Budget variable has a positive and not statistically significant effect on Economic Growth and the APBD variable has a statistically significant positive effect on the Economic Growth of the City of Manado.

Keywords: *Supervision Budget, Regional Budget, Economic Growth*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menuntut pembangunan yang merata di setiap daerah sehingga pembangunan yang tadinya dilaksanakan secara terpusat diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan pemerintah dibidang otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menata ulang hubungan antara pusat dan daerah dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang menyangkut urusan penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdampak berkurangnya kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunannya. Berdasarkan hal itu, pengawasan mutlak diperlukan dan dikembangkan secara terpadu dan konsisten. Dengan diberikannya kewenangan atau pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri serta membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah terlebih khusus pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Perlu adanya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dimulai dengan perencanaan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengolahan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 209 ayat (2), dinyatakan bahwa perangkat daerah /kota terdiri dari Sekertariat daerah, sekertariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Salah satu dari perangkat daerah tersebut berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah agar terbebas dari segala bentuk penyelewengan. Perangkat daerah tersebut adalah Inspektorat daerah.

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, tingkat provinsi/kabupaten/kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan serta kebersihan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan kebersihan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran di semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat dengan tujuan perbaikan kondisi ekonomi sehingga bisa mensejahterakan dan memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam organisasi sektor publik tidak pernah luput dari tudingan sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik yang tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang

menjalankan roda pemerintahan yang sumbernya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah haruslah diimbangi dengan adanya pemerintah yang bersih.

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan kebersihan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintah daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah, ada sebagian oknum dilingkungan pemerintah daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah. Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut. Pengawasan intern berarti pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur kecurangan atau penyelewengan dengan diadakannya pengawasan intern dalam rangka mengawasi kinerja pengelolaan pemerintah daerah sehingga terciptanya *good governance*.

Sebagai suatu lembaga pengawas internal pemerintah daerah, inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik dilihat dari aspek fungsi manajemen maupun pencapaian visi dan misi pemerintah. Dari fungsi manajemen inspektorat berperan sebagai fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD. Inspektorat Kota Manado memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai salah satu misi ialah mencegah terjadinya penyimpangan dalam manajemen pemerintah daerah. Dalam melakukan pengawasan didalam lingkungan pemerintahan Kota Manado dengan melakukan pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang terdiri atas pemeriksaan reguler dimana aspek yang diperiksa adalah aspek kebijakan daerah, aspek kelembagaan, aspek pegawai daerah, aspek keuangan daerah dan aspek barang daerah. Sedangkan untuk pemeriksaan khusus karena adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat. Pengawasan internal bertujuan menilai system pengendalian manajemen, efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja. Berikut ini adalah rincian anggaran pemasaran Inspektorat Kota Manado tahun 2017-2018:

Tabel 1
Anggaran Pengawasan

| Program / kegiatan | Target kinerja | Jumlah induk |
|---|----------------|----------------------|
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | 3,279,546,000 |
| Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 400 LHP | 1,566,141,000 |
| Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah | 45 LHP | 365,000,000 |
| Inventarisasi temuan pengawasan | 2 Kali | 95,750,000 |
| Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 12 Bln | 834,655,000 |
| Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | 30 Kali | 360,000,000 |
| Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | 4 Kali | 58,000,000 |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | 645,000,000 |
| Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 12 Bln | 645,000,000 |
| Jumlah Tahun 2017 | | 3,924,546,000 |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | 2,622,889,680 |
| Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 410 LHP | 1,521,560,500 |
| Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah | 41 LHP | 265,000,000 |
| Inventarisasi temuan pengawasan | 1 Kali | 95,750,000 |
| Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 12 Bln | 554,389,000 |
| Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | 25 Kali | 128,190,180 |
| Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | 4 Kali | 58,000,000 |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | 383,660,000 |
| Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 12 Bln | 383,660,000 |
| Jumlah Tahun 2018 | | 3,006,549,680 |

Sumber : Inspektorat Kota Manado, 2018

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka dapat dilihat bahwa adanya penurunan anggaran pada tahun 2018. Hasil Pemeriksaan Inspektorat kota Manado masih didapati temuan pada perangkat daerah baik berupa temuan administrasi atau kerugian negara dengan jumlah yang berbeda. Pengawasan merupakan kegiatan pengendalian internal yang sangat penting karena itu harus dioptimalkan kinerja APIP agar pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat tercapai. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang “*Pengaruh pengawasan terhadap pertumbuhan ekonomi Di Kota Manado*”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

1. untuk mengetahui pengaruh jumlah terhadap APBD Kota Manado.
2. untuk mengetahui pengaruh jumlah Pengawasan dan APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Sehingga tujuan dari pembangunan ekonomi itu untuk meningkatkan pendapatan nasional dan juga untuk meningkatkan produktivitas (Irawan dan Soeparmoko, 1996). Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang

Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pertumbuhan ekonomi adalah sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional seperti itu sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas, dengan menggunakan kerangka pemikiran kemungkinan produksi sebagai dasar guna memahami tingkatan, komposisi dan pertumbuhan output nasional. Pertumbuhan ekonomi memiliki 3 faktor atau komponen utama yaitu : 1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia, 2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, 3. kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi menurut Putong (2003) adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti yaitu dengan meningkatnya pendapatan per kapita dalam suatu periode perhitungan tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensidan sumber-sumber kekayaan daerah.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah,sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Menurut Abdul Halim (2008:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Pengawasan

Pengertian Pengawasan Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)” (Terry, 2007:15). Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri” (Terry, 2007:137). Hal tersebut juga didukung oleh Situmorang dalam bukunya Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, yang

mengatakan bahwa: “Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

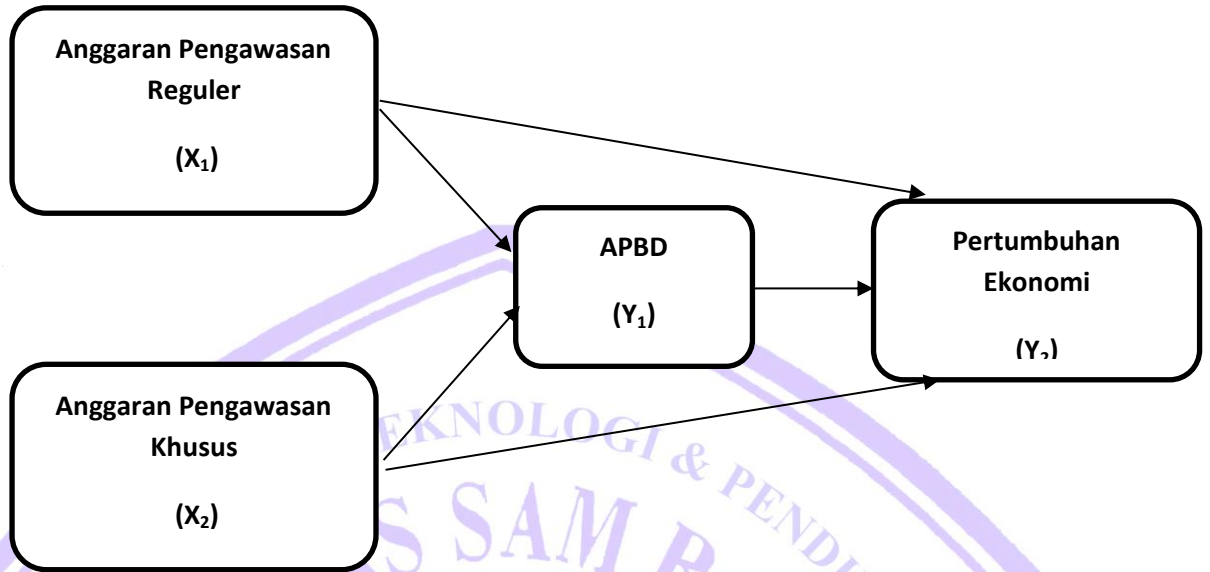
Penelitian Terdahulu

Indra Susila, Yolamalinda, Rian Hidayat (2014) tentang Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat menemukan bahwa variabel Belanja Rutin (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, variabel Belanja Pembangunan (X2) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, dan variabel Investasi (X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan variabel yang diteliti mempunyai pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Suharti Dan Reka (2018) tentang Analisis Perencanaan, Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau 2012-2016. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, Linda Lambey tentang Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (1) penambahan tenaga pengawas; (2) meningkatkan kompetensi APIP; (3) meningkatkan alokasi anggaran pengawasan; (4) penambahan fasilitas pengawasan; (5) mengoptimalkan peran APIP sebagai konsultan dan katalis; (6) pemberian sanksi tegas bagi SKPD yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan; dan (7) adanya komitmen bersama pemerintah daerah dalam bidang pengawasan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara variable anggaran pengawasan terhadap realisasi APBD dan dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kota Manado dengan pengambilan data penelitian melalui Inspektorat Kota Manado. Waktu penelitian adalah dari tahun 2015-2017.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Substruktur 1

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh antara variabel APBD (Y₁) (variabel dependen) dengan Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) dan Anggaran Pengawasan Khusus (X₂) (variabel independen). Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + E_1$$

$$APBD_{Y_1} = -0.065(APR_{X_1}) + 0.127 (APK_{X_2}) + 0.924_{E_1}$$

Tabel 2
Persamaan Anggaran Pengawasan Reguler, Anggaran Pengawasan Khusus terhadap APBD

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 7,789E11 | 8,044E10 | | 9,683 | ,000 |
| | Anggaran Pengawasan Reguler (X1) | -197,757 | 2167,605 | -,065 | -,091 | ,929 |
| | Anggaran Pengawasan Khusus (X2) | 74,882 | 419,105 | ,127 | ,179 | ,862 |

Sumber : Hasil Olah SPSS 18

Hasil estimasi Anggaran Pengawasan Reguler (X_1) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X_1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap APBD (Y_1). Nilai signifikansi sebesar 0.929 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.929 > 0.10$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X_1) mempunyai t_{hitung} yakni 0.091 dengan $t_{tabel} = 1.39682$. jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X_1) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel APBD (Y_1). Nilai t negatif menunjukkan bahwa Anggaran Pengawasan Reguler (X_1) mempunyai hubungan yang tidak searah dengan APBD (Y_1). Jadi disimpulkan Anggaran Pengawasan Reguler tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD. Hasil estimasi Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap APBD (Y_1). Nilai signifikansi sebesar 0.862 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.862 > 0.10$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) mempunyai t_{hitung} yakni 0.862 dengan $t_{tabel} = 1.39682$. jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) tidak memiliki kontribusi terhadap APBD (Y_1). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) mempunyai hubungan yang searah dengan APBD (Y). Jadi disimpulkan Anggaran Pengawasan Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APBD.

Tabel 3
Uji F Persamaan Struktur 1

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|------|-------------------|
| 1 | Regression | 2,165E20 | 2 | 1,082E20 | ,026 | ,974 ^a |
| | Residual | 3,736E22 | 9 | 4,151E21 | | |
| | Total | 3,758E22 | 11 | | | |

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y1

Nilai F hitung sebesar 0.026 dengan signifikansi 0.974. Nilai F table 5% dengan nilai f table 4.26. Nilai F hitung sebesar $0.026 < F$ table sebesar 4,26. Berdasarkan hasil Uji F maka variable bebas Anggaran Pengawasan Reguler dan Anggaran Pengawasan Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap APBD sebagai variable terikat.

Persamaan Substruktur 2

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen Anggaran Pengawasan Reguler (X_1), Anggaran Pengawasan Khusus (X_2), dan APBD (Y_1) Terhadap variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (Y_2). Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

$$Y_2 = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3Y_1 + e_t$$

$$PE_{Y_2} = -0.468(APR_{X_1}) + 0.812 (APK_{X_2}) + 0.508 (APBD) + 0,087$$

Tabel 4
Persamaan Anggaran Pengawasan Reguler, Anggaran Pengawasan Khusus dan APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -1,277 | 3,651 | | -,350 | ,736 |
| Anggaran Pengawasan Reguler (X1) | -2,555E-8 | ,000 | -,468 | -,877 | ,406 |
| Anggaran Pengawasan Khusus (X2) | 8,569E-9 | ,000 | ,812 | 1,520 | ,167 |
| APBD (Y1) | 9,077E-12 | ,000 | ,508 | 2,027 | ,077 |

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y2)

Hasil estimasi Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PE (Y₂). Nilai signifikansi sebesar 0.406 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.929 > 0.10$, maka H₁ ditolak dan H₀ diterima. Variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) mempunyai t_{hitung} yakni 0.877 dengan t_{tabel} = 1.41492. jadi t_{hitung} < t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Nilai t negatif menunjukkan bahwa Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Jadi disimpulkan Anggaran Pengawasan Reguler tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil estimasi Anggaran Pengawasan Khusus (X₂) pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X₂) berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Nilai signifikansi sebesar 0.167 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.167 > 0.10$, maka H₁ ditolak dan H₀ diterima. Variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X₂) mempunyai t_{hitung} yakni 1.520 dengan t_{tabel} = 1.41492. jadi t_{hitung} < t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X₂) tidak memiliki kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X₂) mempunyai hubungan yang searah dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Jadi disimpulkan Anggaran Pengawasan Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil estimasi APBD (Y₁) pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel APBD (Y₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Nilai signifikansi sebesar 0.077 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$, atau $0.0380 < 0.05$, maka H₁ diterima dan H₀ ditolak. Variabel APBD (Y₁) mempunyai t_{hitung} yakni 2.027 dengan t_{tabel} = 1.41492. jadi t_{hitung} > t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa variabel APBD (Y₁) memiliki kontribusi terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel APBD (Y₁) mempunyai hubungan yang searah dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Jadi disimpulkan APBD memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 5 Uji F Persamaan Struktur 2

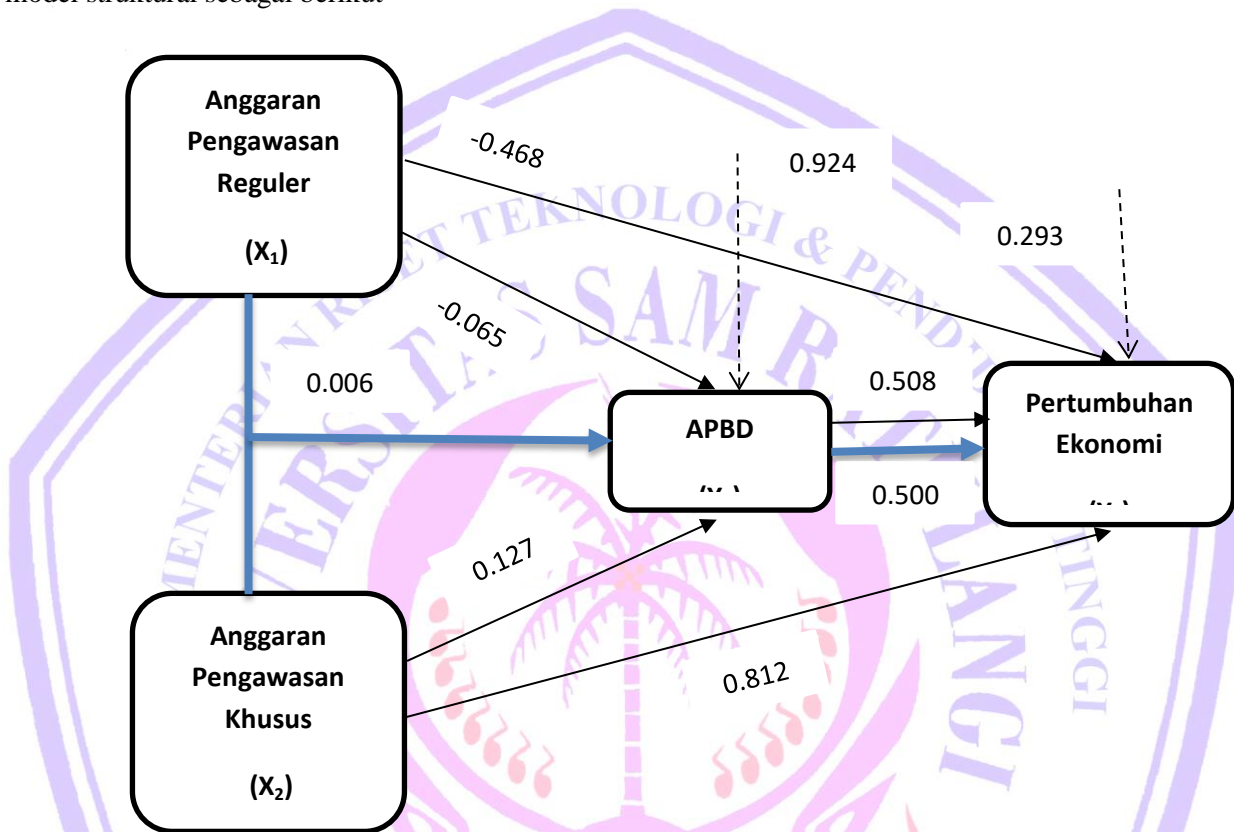
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---------------------------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 5,996 | 3 | 1,999 | 2,669 | ,119 ^a |
| | Residual | 5,991 | 8 | ,749 | | |
| | Total | 11,987 | 11 | | | |
| a. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2 | | | | | | |
| b. Dependent Variable: Y2 | | | | | | |

Nilai F hitung sebesar 2.669 dengan signifikansi 0.119. Nilai F table 5% dengan nilai f table 4.07. Nilai F hitung sebesar $2.669 < F$ table sebesar 4,07. Berdasarkan hasil Uji F maka variable bebas

Anggaran Pengawasan Reguler, Anggaran Pengawasan Khusus dan APBD tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable terikat.

Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)

Jadi, keseluruhan pengaruh kausalitas variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X_1), variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) terhadap APBD (Y_1) dan dampaknya terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y_2) secara simultan dengan garis yang berwarna biru dapat digambarkan dalam model struktural sebagai berikut



Gambar 2 Diagram Jalur Keseluruhan Struktur Penelitian

Berdasarkan seluruh koefisien jalur dari hubungan kausalitas yang ada, dapat diketahui Pengaruh Kausal Langsung (PKL) dan Pengaruh Kausal Tidak Langsung (PKTL) dari setiap variabel yang diteliti.

Tabel 6
Rangkuman Hasil Pengaruh Berdasarkan Koefisien Jalur

| Pengaruh Variabel | Koefisien Jalur | Pengaruh Kausal | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | | Langsung | Tidak Langsung | Pengaruh Bersama |
| X ₁ terhadap Y ₁ | -0.065 | -0.065 | - | - |
| X ₂ terhadap Y ₁ | 0.127 | 0.127 | - | - |
| X ₁ terhadap Y ₂ | -0.468 | -0.468 | -0.065x0.508 = -0.033 | |
| X ₂ terhadap Y ₂ | 0.812 | 0.812 | 0.182x0.500 =0.091 | - |
| Y ₁ terhadap Y ₂ | 0.500 | 0.500 | - | - |
| X ₁ , X ₂ terhadap Y ₁ | - | - | - | 0.006 |
| X ₁ , X ₂ , Y ₁ terhadap Y ₂ | - | - | - | 0.500 |
| ε ₁ | 0.924 | 0.924 | - | - |
| ε ₂ | 0.293 | 0.923 | - | - |

Pengaruh kausal langsung dan tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh langsung variabel X₁ terhadap Y₁ sebesar -0.065 (pengaruh total)

b. Pengaruh langsung variabel X₁ terhadap Y₂ sebesar -0.468

Pengaruh tidak langsung variabel X₁ terhadap Y₂ sebesar -0.033

Total pengaruh variabel X₁ terhadap Y₂ adalah sebesar -0.501

c. Pengaruh langsung variabel X₂ terhadap Y₁ sebesar 0,127 (pengaruh total)

d. Pengaruh langsung variabel X₂ terhadap Y₂ sebesar 0,812

Pengaruh tidak langsung variabel X₂ terhadap Y₂ sebesar 0,270

Total pengaruh variabel X₂ terhadap Y₂ adalah sebesar 1.082

e. Pengaruh langsung variabel Y₁ terhadap Y₂ sebesar 0,500

f. ε₁ sebesar 0,924 menunjukkan koefisien pengaruh variabel lain diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabel Y₁.

g. ε₂ sebesar 0.293 menunjukkan koefisien pengaruh variabel lain diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabel Y₂.

Pembahasan

Hasil estimasi Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap APBD (Y₁). Nilai signifikansi sebesar 0.929 lebih besar dari nilai α = 10%, atau 0.929 > 0.10, maka H₁ ditolak dan H₀ diterima. Variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) mempunyai t_{hitung} yakni 0.091 dengan t_{tabel} = 1.39682. jadi t_{hitung} < t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) tidak memiliki kontribusi terhadap variabel APBD (Y₁). Nilai t negatif menunjukkan bahwa Anggaran Pengawasan Reguler (X₁) mempunyai hubungan yang tidak searah dengan APBD (Y₁). Jadi disimpulkan Anggaran Pengawasan Reguler tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara pengawasan dengan APBD. Artinya, apabila pengawasan terhadap APBD meningkat akan mempengaruhi peningkatan APBD. Dimana pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua program-program kebijakan dan kegiatan dilakukan dengan sebaik mungkin dan dengan aturan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah pada penelitian ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah APBD.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Suharti dan Reka (2018) Pengawasan memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hal ini dikarenakan nilai t_{hitung} 2,237 dan t_{tabel} 2,00324. Jadi t_{hitung} > t_{tabel} (1,453 > 2,00324 atau sig 0,034 < 0,05) Hal ini berarti Pengawasan semakin meningkat maka Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah juga meningkat. Hasil estimasi Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap APBD (Y_1). Nilai signifikansi sebesar 0.862 lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$, atau $0.862 > 0.10$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) mempunyai t_{hitung} yakni 0.862 dengan $t_{tabel} = 1.39682$. jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) tidak memiliki kontribusi terhadap APBD (Y_1). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel Anggaran Pengawasan Khusus (X_2) mempunyai hubungan yang searah dengan APBD (Y). Jadi disimpulkan Anggaran Pengawasan Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APBD. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan pengawasan dengan APBD. Artinya, pengawasan makin meningkat maka APBD juga akan mengalami peningkatan *ceteris paribus*.

Pengawasan memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hal ini dikarenakan nilai t_{hitung} 2,237 dan t_{tabel} 2,00324. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,453 > 2,00324$ atau sig 0,034 $< 0,05$) Hal ini berarti Pengawasan semakin meningkat maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga meningkat. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Irna Setiyaningrum (2017) yang menyatakan bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil estimasi APBD (Y_1) pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel APBD (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_2). Nilai signifikansi sebesar 0.077 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$, atau $0.0380 < 0.05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Variabel APBD (Y_1) mempunyai t_{hitung} yakni 2.027 dengan $t_{tabel} = 1.41492$. jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa variabel APBD (Y_1) memiliki kontribusi terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y_2). Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel APBD (Y_1) mempunyai hubungan yang searah dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y_2). Jadi disimpulkan APBD memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh positif APBD dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila terjadi peningkatan terhadap APBD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pengawasan Reguler berpengaruh negatif tidak signifikan secara statistik terhadap APBD. Anggaran Pengawasan Khusus berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap APBD Kota Manado.
2. Hasil penelitian variabel Anggaran Pengawasan Reguler berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Anggaran Pengawasan Khusus berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel APBD berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado.

Saran

Bagi pemerintah Kota Manado diharapkan lebih memperhatikan anggaran pengawasan sehingga nantinya anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama pemerintah Kota Manado sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Manado akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, Linda Lambey. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal

- Halim. 2008. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Indra Susila, Yolamalinda, Rian Hidayat. (2014). Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal.
- Irawan dan Suparmoko. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Putong, Iskandar. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi Kedua. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suharti dan Reka. (2018). Analisis Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Jurnal.
- Terry, 2007, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

